

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI INDONESIA**

¹SAHALA PURBA, ²GRACESIELA YOSEPHINE SIMANJUNTAK

**^{1,2}DOSEN TETAP FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA**

Sahala.purba@yahoo.com
gracesielasimanjuntak@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of testing is to determine the effect of Economic Growth, General Allocation Funds (DAU), Regional Original Revenues (PAD), Over Time Budget Implementation (SiLPA) and the total population on Capital Expenditures in Indonesian Provinces. In this study, the sample was selected using the method purposive sampling and the data were tested using multiple regression analysis. The 2013-2015 provincial financial reports in Indonesia constitute the population in this study. The analysis results obtained that partially the General Allocation Fund (DAU), Regional Original Revenue (PAD), and the Total Population have a significant negative effect on Capital Expenditures in the Provinces in Indonesia, while the economic growth and the excess of the Execution of the Budget (SiLPA) have no effect and no significantly to Capital Expenditures in Indonesian Provinces. Simultaneously Economic Growth, General Allocation Funds, Regional Original Receipts, More Budget Implementation, and Population Amount to Capital Expenditures have an effect on Capital Expenditures in Indonesian Provinces.

Keywords : Economic Growth, DAU, PAD, SiLPA, Total Population, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan (UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004) ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Penerimaan pemerintah seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk program-program publik, yang mana lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006). Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan.

PAD yang besar di suatu daerah akan membuat prioritas pembangunan di daerah tersebut semakin meningkat (Mahmudi, 2011). Dengan kondisi pendapatan daerah yang besar, komposisi belanja yang dilakukan menunjukkan bahwa belanja Provinsi dihabiskan untuk sektor administrasi umum pemerintahan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan. Artinya pendapatan yang besar disebagian besar dibelanjakan untuk menunjang administrasi daerah. Kemudian porsi belanja modal, mencakup obat-obatan, alat kesehatan, alat kontrasepsi, dan lain-lain, sangat sedikit dibandingkan belanja pengadaan barang-barang tersebut.

Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apa lagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Lulung, 2009), SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan

ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam suatu pembangunan daerah. Ketika menggabungkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* saat anggaran belanja disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Adapun tingkat realisasi belanja modal pada provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kinerja Pemerintahan Daerah (Rasio Belanja Modal)

Tahun	Realisasi Belanja Modal (RP)	Realisasi Total Belanja (RP)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	208.653.707 .390.403	915.518.210.3 55.374	22,79
2014	180.917.468 .258.032	798.885.131.9 24.701	22,65
2013	158.959.281 .392.840	707.010.145.5 48.565	22,48

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Hasil Olahan, 2019)

Adapun salah satu rasio untuk menilai kinerja pemerintahan daerah secara nasional menggunakan analisis rasio belanja modal. Rasio belanja modal akan menunjukkan perbandingan besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk belanja modal. Bahwa data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2015 rasio belanja modal mengalami peningkatan bahwa sebagian besar realisasi anggaran lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin, dibandingkan realisasi untuk membiayai kegiatan pembangunan. Sehingga menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan daerah lebih banyak membiayai belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin kecil rasio belanja modal keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin kecil pula perhatian pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Tabel 1.2
Research Gap

No	Uraian	Penelitian	Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)	Tidak Berpengaruh Positif
		Bambang Suprayitno (2015)	Berpengaruh Signifikan Tetapi Negatif
		Nanda Dwi Novalia (2016)	Tidak Berpengaruh
2.	Dana Alokasi Umum	Junaedy (2014)	Berpengaruh Positif dan Signifikan
		Rachmawati A. Rifai (2017)	Pengaruh Signifikan

No	Uraian	Penelitian	Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal
		Andri Tolu, Een N. Walewangko, SteevaY.L.Tumangkeng (2016)	Tidak Berpengaruh Positif
3.	Pendapatan Asli Daerah	Junaedy (2014)	Tidak Berpengaruh
		Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)	Berpengaruh Positif
		Venny Tria Vanesha; Selamat Rahmadi; Pamadi (2019)	Tidak Berpengaruh
4.	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran	Junaedy (2014)	Tidak Berpengaruh
		Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)	Berpengaruh Positif
		Laila MurhaniKasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi (2018)	Berpengaruh Signifikan
5.	Jumlah Penduduk	Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014)	Tidak Efisien
		Pertamaya Sari (2017)	Berpengaruh Positif

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pelaksanaan anggaran dan jumlah penduduk terhadap pengalokasian belanja modal masih terdapat celah. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia”**.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sisa lebih pelaksanaan anggaran terhadap belanja modal.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pelaksanaan anggaran, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

LANDASAN TEORI

Belanja Modal

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006). Pembangunan dalam sektor pelayanan

kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Dana Alokasi Umum

Pasal 1 UU RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang digunakan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PP No.55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangannya 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 35, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Baldrick Siregar (2015:31) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah".

Jumlah Penduduk

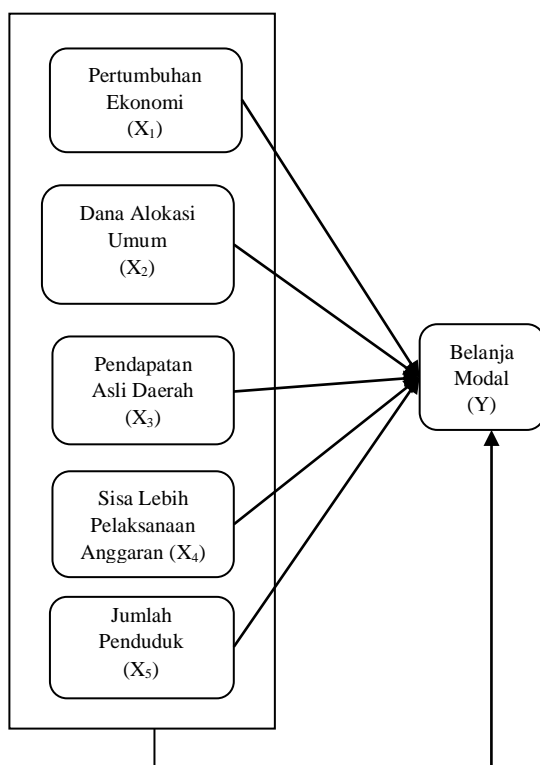
Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Menurut Kartomo penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap disana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara ataupun bukan. Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia

selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini, berarti jumlah penduduk disuatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan secepatnya kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemenuh kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian ini dimana variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*) meliputi, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, Dan Jumlah Penduduk.
2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) yaitu Belanja Modal.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Provinsi yang ada di Indonesia dengan tahun pengamatan 2013-2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari-Mei 2019.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki jenis penelitian dengan metode asosiatif. Menurut Juandi (2013:4) metode penelitian asosiatif adalah penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan variabel lain, atau apakah suatu variabel menjadi penyebab perubahan dari variabel lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD setiap Provinsi yang ada di Indonesia periode tahun 2013-2015 yang berasal dari situs www.djpk.co.id.

Populasi

Populasi merupakan objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan provinsi yang ada di Indonesia selama tahun pengamatan 2013-2015.

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan adalah total sampling. Teknik yang digunakan untuk mengambil seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. total sampel ada 98 sampel dari 34 provinsi selama 3 tahun pengamatan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pengujian secara parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal menunjukkan signifikan $0,879 > 0,05$ dan t hitung sebesar $0,153 <$ dari t tabel $1,989$. Artinya tingkat signifikansi $> 0,05$ dan t hitung $<$ dari t tabel, maka secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan pemerintah mengalokasikan dana belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Namun kenaikan pada belanja modal terlalu kecil pada tahun 2013-2015, dimanakenaikan pada tahun 2013-2014 sebesar $0,17\%$ dan pada tahun 2014-2015 sebesar $0,14\%$. Hal inilah kemungkinan penyebabnya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_1 ditolak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Bambang Suprayitno (2015), menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Pengujian secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal menunjukkan signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $-6,067 >$ dari t tabel $1,989$. Artinya tingkat signifikansi $< 0,05$ dan t hitung bertanda negatif, maka secara parsial variabel DAU berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_2 diterima. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Junaedy (2014) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Andri Tolu, Een N. Walewangko, Steeva Y.L. Tumangkeng (2016), menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal menunjukkan signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $-6,491 >$ dari t tabel $1,989$. Artinya tingkat signifikansi $< 0,05$ dan t hitung bertanda negatif, maka secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_3 diterima. Hal ini sejalan dengan Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan penelitian Junaedy (2014), melakukan penelitian dan membuktikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Pengujian secara parsial Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal menunjukkan signifikan $0,927 > 0,05$ dan t hitung sebesar $0,092 <$ dari t tabel $1,989$. Artinya tingkat signifikansi $> 0,05$ dan t hitung $<$ dari t tabel, maka secara parsial variabel SiLPA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_4 ditolak. Hal ini dikarenakan SiLPA tidak digunakan untuk membiaya alokasi belanja modal pada tahun 2013-2015, karena SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila pendapatan lebih kecil daripada realisasinya.

Dimana pendapatan pada tahun 2013 sebesar Rp 679.874.010.259.797, 2014 sebesar Rp 791.327.141.325.386, dan 2015 sebesar Rp 858.822.933.889.578. Sedangkan Untuk belanja pada tahun 2013 sebesar Rp 679.874.010.259.797, tahun 2014 sebesar Rp 791.327.141.325.386, dan tahun 2015 sebesar Rp 872.486.887.407.818. Maka dapat dilihat jika SiLPA naik atau turun maka tidak mempengaruhi alokasi belanja modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian Junaedy (2014) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Laila MurhaniKasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi (2018), melakukan penelitian dan membuktikan variabel Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Pengujian secara parsial Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal menunjukkan signifikan $0,010 < 0,05$ dan t hitung sebesar $-2,644 >$ dari t tabel 1,989. Artinya tingkat signifikansi $< 0,05$ dan t hitung bertanda negatif, maka secara parsial variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_5 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Pertamaya Sari (2017) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014), melakukan penelitian dan membuktikan variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendaptan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Pengujian secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendaptan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 4.7. Dimana nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $19,756 > 2,31$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendaptan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang telah didapatkan, bahwa H_6 diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015. Dimana pada tahun 2013-2015 APBD lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin dibanding belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Junaedy (2014) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015. Hal ini sejalan dengan Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015. Dimana SiLPA tidak digunakan untuk membiayai alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Junaedy (2014) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015. Hal ini sejalan dengan penelitian Pertamaya Sari (2017) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.

6. Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015.
7. Nilai R^2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal secara simultan mempengaruhi Belanja Modal sebesar 51%, sisanya 49% dipengaruhi faktor-faktor lain.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Banyak faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, pada penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk. Tentu saja, tidak hanya kelima faktor ini yang dapat mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia.
2. Waktu data penelitian yang hanya tiga tahun mungkin tidak mempresentasikan keadaan sesungguhnya, karena apabila rentang waktu diperpanjang kemungkinan dapat memberikan hasil penelitian yang secara signifikan berbeda dengan penelitian ini.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan variabel independen yang lebih banyak sehingga lebih dapat menjelaskan variabel dependen.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan periode waktu (tahun) yang selalu diperbaharui dan mengambil jangka waktu penelitian yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Litbang NTT. IV-03
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiono.1994. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Devita Andri, Arman Delis, Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. 2(2) ; 63-69.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Haryanto, Sahrudin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Fitriana Nihatul, Sudarti. 2018. *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Ekonomi. 2(2) ; 332-345.
- Junaedy. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal*. Jurnal Future. 162-174.
- Kasdy Murhani Laila, Nadirsyah, Fahlevi Heru. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dan implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 4(1) ; 1-10.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Ull Press.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku Sikap Kinerja Aprat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, 23-26 Agustus 2006.
- M.L Jinghan. *Ekonomi Pembangunan dan Perancangan*. Edisi 3. Jakarta: Rajawali Press.
- M.P Todoro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Novalia, Nanda Dwi. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *"Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY"*. JAAI. Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Rifai A Rachmawati. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis. 5(7) ; 169-179.
- Sari, Pertama. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Ifaterning Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sari Yudia Mya Made Desak, Wirama Gede Dewa. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Moderasi*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 22(3) ; 2065-2087.
- Smith, Adam. 1776. *The Wealth Of Nations*. Scotland, Great Britain. W. Strahan and T. Cadel.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Penngantar*. Rajawali Pers.
- Suprayitno Bambang. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintahan Provinsi di Pulau Jawa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. 2(1) ; 106-112.
- Tolu Andri, Walewangko N Een, Tumangkeng L.Y. Steeva. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16(2) ; 540-548.

Vanesha Tria Venny, Rahmadi Selamat, Parmadi. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. 14(1). 27-34.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Daerah.

www.djpk.kemenkeu.go.id.

www.bps.go.id.

Lampiran

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,864	,061		14,278	,000
Pertumbuhan Ekonomi	,001	,009	,013	,153	,879
Dana Alokasi Umum	-,334	,055	-,598	-6,067	,000
Pendapatan Asli Daerah	-,343	,053	-,686	-6,491	,000
Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran	,003	,034	,007	,092	,927
Jumlah Penduduk	-,015	,006	-,242	-2,644	,010

Uji Signifikansi simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,154	5	,031	19,756	,000 ^b
Residual	,133	85	,002		
Total	,287	90			

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,733 ^a	,537	,510	,03952	1,812